



LKjIP 2016

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2016, dan dapat dijadikan bahan acuan dalam mengevaluasi Kinerja ditahun tahun mendatang

KATA PENGANTAR



Pujastuti Angayubagya kami haturkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2016 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Keterlibatan semua jajaran dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali sangat membantu dalam penyusunan LKjIP ini dan untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh Bidang, Sekretariat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta semua staf Dinas PU Provinsi Bali yang membantu secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan tersusunnya LKjIP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2016.

LKjIP disamping sebagai Laporan Kinerja juga merupakan cerminan realisasi rencana kegiatan yang telah dijalankan pada tahun 2016. Semoga untuk tahap selanjutnya dapat diperoleh data-data dan informasi yang semakin maksimal dari Dinas PU Provinsi Bali sehingga dapat menghasilkan LKjIP yang lebih baik.

Denpasar, 23 Januari 2017
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Bali,

Ttd.

Ir. I Nyoman Astawa Riadi, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600916 198012 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKTHISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I URAIAN SINGKAT ORGANISASI	1
1.1 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali.....	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.3 Issu Strategis.....	3
1.4 Struktur Organisasi.....	4
BAB II PERJANJIAN KINERJA	6
2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2016.....	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja.....	9
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	12
3.3 Realisasi Keuangan.....	33
BAB IV PENUTUP	38
LAMPIRAN – LAMPIRAN :	
Lampiran I : Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali	
Lampiran II : Perjanjian Kinerja Tahun 2016	

IKTHISAR EKSEKUTIF

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali mempunyai peran yang sangat strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali, dimana Dinas PU Provinsi Bali berperan dalam bidang Infrastruktur, yang meliputi infrastruktur Jalan, sumber daya air, penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah, pengelolaan sistem penyediaan air minum, pengelolaan sistem air limbah perpipaan terpusat, TPA Regional serta energi dan sumber daya mineral.

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pekerjaan umum Tahun 2014-2018 merupakan Dokumen Perencanaan Strategi yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka pendek) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. Visi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali adalah : “Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang handal untuk kehidupan yang produktif, berkelanjutan dan sejahtera berlandaskan konsep Tri Hita Karana menuju Bali Mandara”.

Untuk mencapai target Renstra 2014-2018, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali telah menyusun Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2016 terdiri dari 7 sasaran strategis yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Mantapnya kondisi Infrastruktur
2. Meningkatnya pengendalian abrasi
3. Ketersediaan dan kecukupan insfrastruktur.
4. Meningkatnya energi baru terbarukan
5. Meningkatnya pengendalian sumber daya pertambangan dan geologi
6. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah
7. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala SKPD terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2016, yang telah ditetapkan di awal tahun dan juga merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Capaian indikator kinerja terhadap 7 (tujuh) sasaran strategis yang telah ditetapkan, menjadi tolok ukur keberhasilan dari apa yang ditetapkan di awal tahun anggaran. Capaian dari masing-masing indikator sebagian besar diatas 97%, walaupun masih terdapat beberapa capaian yang lebih kecil dari 95%, namun secara umum semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. Capaian ini akan dijadikan pedoman pada apa yang akan direncanakan dan ditetapkan pada tahun anggaran berikutnya, untuk mencapai target Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali tahun 2014-2018.

Realisasi Anggaran yang bersumber dari dana APBD Provinsi Bali, pagu sebesar Rp. 588.768.690.127,00 dan terealisasi sebesar Rp. 577.911.991.469,58 atau sebesar 98,16% sehingga terjadi efisiensi sebesar 1,84 %.

BAB I

URAIAN SINGKAT ORGANISASI

1.1. DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI BALI

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali merupakan salah satu bagian dari 42 SKPD yang ada dalam Pemerintah Provinsi Bali. Dinas PU merupakan SKPD yang bertugas melaksanakan pembangunan dibidang infrastruktur. Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali memperhatikan keseimbangan berbagai aspek lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan akuntabel. Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, untuk meningkatkan harkat dan martabat serta memperkuat jati diri dan kepribadian masyarakat Bali, dalam pendekatan lokal, nasional dan global.

Sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan diterbitkannya Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, maka Dinas PU Provinsi Bali beserta jajarannya telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PU Provinsi Bali periode tahun 2016 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala SKPD terhadap Perjanjian Kinerja 2016, yang dilaksanakan oleh Bidang, UPT dan Sekretariat dilingkungan Dinas PU Provinsi Bali. Pembuatan LKjIP ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan anggaran, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan terhadap Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun. dengan mengacu pada :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah;
- Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP-135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali dan Pergub Nomor 100 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Rincian Tugas Pokok UPT di

lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional di bidang pekerjaan umum yang merupakan sebagian kewenangan desentralisasi Provinsi serta kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
- b. Pengelolaan dan fasilitasi di bidang pekerjaan umum;
- c. Pelaksanaan pelayanan umum dan pemberian rekomendasi di bidang pekerjaan umum;
- d. Pembinaan pelaksana tugas sesuai dengan bidang pekerjaan umum;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha; dan
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

1.3. ISSU STRATEGIS

Beberapa Issu Strategis yang muncul pada Bidang Infrastruktur sebagai berikut:

1. Kondisi dan kapasitas infrastruktur pekerjaan umum belum memenuhi standar kebutuhan;
2. Keterbatasan akses dan kualitas layanan air minum, sanitasi dan ketenagalistrikan;
3. Penurunan kualitas lingkungan akibat perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya alam;
4. Pemanfaatan ruang kawasan strategis belum sesuai dengan peruntukkan;
5. Berkembangnya kantong-kantong permukiman kumuh;
6. Rendahnya daya saing para pelaku jasa konstruksi.

Permasalahan yang dihadapi secara umum Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali yang mempengaruhi capaian kinerjanya antara lain :

1. Pemanfaatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) khususnya SPAM Telagawaja dan Guyangan belum berjalan secara optimal yang diakibatkan oleh berbagai faktor baik yang bersifat teknis maupun non teknis serta faktor topografi;
2. Belum maksimalnya Pengoperasian SPAM Penet Unit Distribusi di Kabupaten Badung.

1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2011, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali dibantu oleh :

1. Sekretariat Dinas PU;
2. Bidang Pengkajian dan Jasa Konstruksi;
3. Bidang Sumber Daya Air;
4. Bidang Bina Marga;
5. Bidang Cipta Karya;
6. Bidang Tata Ruang dan Perumahan;
7. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. UPT. Balai Peralatan dan Pengujian;
9. UPT. Pengelolaan Air Minum;
10. UPT. Pengelolaan Air Limbah;
11. UPT. Pengelolaan Sampah.

Secara rinci Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdapat pada **Lampiran 1**

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan Perjanjian Kinerja adalah

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah;
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

- Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

2.1 PENETAPAN KINERJA

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali mempunyai 18 (delapan belas) program utama yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan. Pada tahun anggaran berjalan, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2016 sebagai rancangan awal target kinerja kegiatan di masing-masing bidang.

Penetapan Kinerja Tahun 2016 terdiri dari 7 sasaran strategis yang ingin dicapai, yaitu :

SASARAN STRATEGIS 1	
Mantapnya kondisi Infrastruktur	
Indikator Kinerja	Target
Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	65%
Jumlah penambahan kapasitas penyediaan air baku (m ³)	150.000 m ³
Prosentase Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	86,89 %
Prosentase kehandalan bangunan gedung negara	55,00 %
Prosentase lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	66,00 %

SASARAN STRATEGIS 2	
Meningkatnya pengendalian abrasi	
Indikator Kinerja	Target
Prosentase panjang pantai yang tertangani dari ancaman abrasi	55,26 %

SASARAN STRATEGIS 3	
Meningkatnya Ketersediaan dan ketercukupan insfrastruktur.	
Indikator Kinerja	Target
Prosentase penduduk yang berakses air limbah di Provinsi Bali	83,00 %
Prosentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali	80,00 %
Prosentase cakupan layanan pengelolaan sampah di Provinsi Bali	75,00 %
Prosentase elektrifikasi	88,60 %

SASARAN STRATEGIS 4	
Meningkatnya energi baru terbarukan	
Indikator Kinerja	Target
Jumlah kapasitas energi baru terbarukan	2,14 MW

SASARAN STRATEGIS 5	
Meningkatnya pengendalian sumber daya pertambangan dan geologi	
Indikator Kinerja	Target
Prosentase jumlah usaha pertambangan yang berizin	45,00 %

SASARAN STRATEGIS 6	
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	
Indikator Kinerja	Target
Prosentase jumlah izin pemanfaatan air tanah yang dilengkapi rekomendasi teknis	70,00 %

SASARAN STRATEGIS 7	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	
Indikator Kinerja	Target
Prosentase responden yang puas terhadap kualitas hasil layanan laboratorium pengujian dan alat berat	100,00 %
Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan air limbah	100,00 %
Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan air minum	100,00 %
Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan pengolahan persampahan	100,00 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PU Provinsi Bali tahun 2016 ini didasarkan kepada evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2016.

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali tahun 2016 dilakukan dengan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali tahun 2016 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali tahun 2016 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1			
Mantapnya kondisi Infrastruktur			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	65,00%	65,00%	100,00
Jumlah penambahan kapasitas penyediaan air baku (m3)	150.000 m3	189.425 m3	126,23
Prosentase Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	86,89 %	82,72 %	95,20
Prosentase kehandalan bangunan gedung negara	55,00 %	58,22 %	105,85

Prosentase lingkungan perumahan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	66,00 %	64,20 %	97,27
---	---------	---------	-------

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya pengendalian abrasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase panjang pantai yang tertangani dari ancaman abrasi	55,26 %	57,60%	104,23

SASARAN STRATEGIS 3

Ketersediaan dan kecukupan infrastruktur.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase penduduk yang berakses air limbah di Provinsi Bali	83,00 %	89,29 %	107,58
Prosentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali	80,00 %	79,81 %	99,76
Prosentase cakupan layanan pengelolaan sampah di Provinsi Bali	75,00 %	68,75%	91,67
Prosentase elektrifikasi	88,60 %	91,56 %	103,34

SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya energi baru terbarukan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah kapasitas energi baru terbarukan	2,14 MW	3,53 MW	164,95

SASARAN STRATEGIS 5			
Meningkatnya pengendalian sumber daya pertambangan dan geologi			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase jumlah usaha pertambangan yang berizin	45,00 %	45,00 %	100,00

SASARAN STRATEGIS 6			
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase jumlah izin pemanfaatan air tanah yang dilengkapi rekomendasi teknis	70,00 %	57,40%	82,00

SASARAN STRATEGIS 7			
Meningkatnya kualitas pelayanan publik			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase responden yang puas terhadap kualitas hasil layanan laboratorium pengujian dan alat berat	100,00 %	100,00 %	100,00
Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan air limbah	100,00 %	100,00 %	100,00
Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan air minum	100,00 %	88,40 %	88,40
Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan pengolahan persampahan	100,00 %	100,00 %	100,00

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis 1 : Mantapnya kondisi Infrastruktur

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik (%);
2. Jumlah penambahan kapasitas penyediaan air baku (m3);
3. Prosentase Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang);
4. Prosentase kehandalan bangunan gedung negara;
5. Prosentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU).

Analisis capaian masing-masing indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

✓ *Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	65,00%	65,00%	100,00%

Target yang ditetapkan adalah 65%. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik adalah sebesar 65,00% dari target yang ditetapkan. Rasio Jaringan Irigasi dalam hal ini adalah panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik dibagi panjang jaringan irigasi keseluruhan x 100%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2015, dimana Target sebesar 60% dan realisasi sebesar 61,39% sehingga capaiannya sebesar 102,31%, Dengan demikian capaian tahun 2016 lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 75,00% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 65,00% sehingga target yang harus dicapai dalam 2 tahun kedepan sebesar 10,00%.

Untuk mencapai target tahun 2016 telah dilaksanakan pekerjaan pada kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Benel di Kab. Jembrana

2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Palasari di Kab. Jembrana
3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Banjarangkan di Kab. Gianyar, Klungkung
4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Dwi Ekabuana di Kab. Bangli, Gianyar
5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bekutel di Kab. Bangli, Gianyar

Selain pekerjaan diatas, untuk mencapai target indikator tersebut juga dilaksanakan pekerjaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun sebagai berikut :

1. Pemeliharaan rutin Jaringan Irigasi berupa perabasan, penggalian waled saluran dan pembersihan saluran.
2. Perbaikan saluran, rumah jaga, tembok pagar bendung, sayap bendung dan pintu air.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2016 adalah secara umum penutupan air tidak ditepati oleh subak sesuai dengan yang telah disepakati dalam waktu sosialisasi pelaksanaan kegiatan, karena petani sudah melakukan kegiatan tanam padi, disamping itu kondisi topografi saluran irigasi cukup ekstrim dan jarak angkut bahan yang cukup sulit. Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2017 adalah perlu meningkatkan intensitas sosialisasi akan adanya pekerjaan rehab Jaringan Irigasi baik secara formal maupun tidak formal kepada petani/subak yang kena dampak pelaksanaan kegiatan.

✓ *Jumlah penambahan kapasitas penyediaan air baku (m3)*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah penambahan kapasitas penyediaan air baku (m3)	150.000 m3	189.425 m3	126,23

Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah 150.000 m3. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian penambahan kapasitas penyediaan air baku adalah 189.425m3 atau sebesar 126,23% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2015, dimana Target sebesar 145.000 m3 dan realisasi sebesar 177.190 m3 sehingga capaiannya sebesar 122,20%, Dengan demikian capaian tahun 2016 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 160.000m3 sedangkan capaian sampai

tahun ini sebesar 189.425 m³ sehingga target Renstra telah terlampaui sebesar 29.425m³.

Dapat dijelaskan bahwa kegiatan penambahan kapasitas penyediaan air baku pada tahun 2016 ini pendanaannya bertumpu pada APBN Kementerian PUPR/ Ditjen Sumber Daya Air (Balai Wilayah Sungai Bali-Penida) sedangkan dari APBD dianggarkan untuk pemeliharaan saja terhadap 4 (embung) yang dibangun melalui dana APBD Provinsi Bali.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2016 adalah masalah pembebasan lahan/tanah. Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2017 adalah perlu koordinasi yang lebih intensif dengan kab./kota dan masyarakat sekitarnya mengenai manfaat pembangunan embung/waduk terkait dengan penambahan penyediaan air baku.

✓ *Prosentase jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	86,89 %	82,72%	95,20

Target yang ditetapkan pada indikator Prosentase Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang) pada tahun 2016 adalah 86,89 %.

Panjang ruas jalan Provinsi adalah 743,34 Km. Dari panjang jalan tersebut dalam kondisi baik 373,85 km, kondisi sedang 241,05 km dan kondisi rusak sepanjang 128,44 km. Apabila dibandingkan dengan kondisi di Tahun 2015, dimana Panjang ruas jalan Provinsi adalah 860,53 Km. Dari panjang jalan tersebut dalam kondisi baik 398,44 km, kondisi sedang 326,51 km dan kondisi rusak sepanjang 135,58 km.

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang) adalah sebesar 82,72 % atau sebesar 95,20 % dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2015 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 84,53 % dan realisasi sebesar 84,24 % dan capaian sebesar 99,65 %, Dengan demikian capaian tahun 2016 lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu, namun secara umum kondisi jalan semakin baik.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 89,78% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 82,72% sehingga target yang harus dicapai dalam 2 tahun kedepan sebesar 7,06%.

Untuk mencapai target yang ditetapkan tahun 2016 telah dilaksanakan kegiatan peningkatan jalan sepanjang 36,225 Km dengan uraian sebagai berikut :

1. Peningkatan Jalan Provinsi Pupuan - Pekutatan 3.125 Km di Kab. Jembrana
2. Peningkatan Jalan Provinsi Sp. Buruan - Senganan - Pacung 4.50 Km di Kab. Tabanan
3. Peningkatan Jalan Provinsi Kayuambua - Penelokan 6.55 Km di Kab. Bangli
4. Peningkatan Jalan Provinsi Pempatan - Ban 3.00 Km di Kab. Karangasem
5. Peningkatan Jalan Provinsi Denpasar - Sp. Petang, Sp. Petang - Batunya dan Jalan Provinsi Sp. Petang - Kintamani 1.70 Km di Kab. Badung
6. Peningkatan Jalan Provinsi Bts. Kota Bangli - Penelokan 5.35 Km di Kab. Bangli
7. Peningkatan Jalan Provinsi Pakseballi - Selat 3.00 Km di Kab. Klungkung dan Kab. Karangasem
8. Peningkatan Jalan Provinsi Ubud - Tegalalang - Bubungbayung 3.00 Km di Kab. Gianyar
9. Peningkatan Jalan Provinsi Kedewatan - Payangan - Baturanyar 3.00 Km di Kab. Bangli
10. Peningkatan Jalan Provinsi Wanagiri - Munduk - Mayong 3.00 Km di Kab. Buleleng

Selain pekerjaan peningkatan jalan juga dilaksanakan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan provinsi sepanjang 19,50 Km dengan uraian sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Bts. Kediri - Tanah Lot sepanjang 3,00 Km
2. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Sp. Niti Mandala - Sp Imam Bonjol (Teuku Umar) sepanjang 2.60 Km
3. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Denpasar - Sanur sepanjang 1,60 Km
4. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Denpasar - Sp. Pesanggaran sepanjang 2.40 Km
5. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Sp. Penelokan - Bts. Buleleng sepanjang 3,00 Km

6. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Sp. Buruan - Batukaru sepanjang 4,20 Km
7. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Sp. Sekardadi-Sp. Bayung Gede sepanjang 2,70 Km (DAK)

Pada kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan provinsi juga dilaksanakan pekerjaan perkuatan tebing sebagai berikut :

1. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi, Ruas Jalan Bts.Buleleng-Kubutambahan Km. 105 + 150
2. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi, Ruas Jalan Bts. Tampaksiring - Tegallalang Km. 39 + 100
3. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi, Ruas Jalan Pupuan - Pekutatan Km. 94 + 300
4. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi, Ruas Jalan Wanagiri - Munduk - Mayong Km. 68 + 800 dan Km. 78 + 700
5. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi, Ruas Jalan Bts. Kota Bangli - Sp. Penelokan Km. 48 + 800
6. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi, Ruas Jalan Antosari - Pupuan Km. 67 + 600
7. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi, Ruas Jalan Seraya - Culik Km. 124 + 150
8. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi, Ruas Jalan Pupuan - Seririt Km. 72 + 700
9. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi, Ruas Jalan Pupuan -Seririt Km. 83 + 300
10. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi, Ruas Jalan Pupuan - Pekutatan Km. 72 +350 dan Km. 75 + 500
11. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi, Ruas Jalan Pupuan - Seririt Km. 74 +250, Km. 78 + 400 dan Km. 78 + 500
12. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi, Ruas Jalan Batukaru - Sp. Buruan Km. 24 + 100, Km. 25 + 850 dan Km. 29 + 400
13. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi, Ruas Jalan Ubud - Tegallalang - Bubung Bayung Km. 30 + 300
14. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi, Ruas Jalan Pupuan - Seririt Km. 86 + 150

15. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi, Ruas Jalan Pupuan - Seririt Km. 84 + 150
16. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi, Ruas Jalan Padang Bai - Silayukti Km. 57 + 850
17. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi, Ruas Jalan Sp. Menanga - Sp. Pempatan Km. 53 + 850
18. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi, Ruas Jalan Petang - Batunya Km. 43 + 300
19. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi, Ruas Jalan Antosari - Pupuan Km. 67 + 700
20. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi, Ruas Jalan Bts. Kota Bangli - Kayuamba Km. 47 + 900
21. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi, Ruas Jalan Bts. Kediri - Tanah Lot Km. 21 + 800 Buruan Senganan - Pacung Km. 48 + 250
22. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi, Ruas Jalan Bts. Kota Amlapura - Seraya Km. 88 + 900
23. Perkuatan Tebing dan Saluran Pada Ruas Jalan Provinsi, Ruas Jalan Surabrata - Blatungan Km. 64 + 650
24. Rendang - Subagan Km. 55 + 375 dan Pakseballi - Selat Km. 48 + 850

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2016 adalah seringnya turun hujan mengakibatkan banyak ruas jalan yang rawan terjadi longsor, sehingga diperlukan penanganan berupa Perkuatan Tebing dan saluran yang lokasinya tersebar diseluruh kabupaten di Provinsi Bali. Permasalahan lainnya adalah keterbatasan anggaran untuk mendukung kegiatan pemeliharaan berkala maupun peningkatan ruas-ruas jalan provinsi yang berdampak pada masih terdapatnya ruas-ruas jalan provinsi yang belum bisa tertangani secara maksimal. Upaya yang perlu dilakukan di tahun 2017 adalah melakukan pengawasan secara optimal dan memanfaatkan mandor-mandor jalan yang tersebar di seluruh kabupaten untuk lebih sigap dan cepat untuk menginformasikan apabila ada longsor pada ruas jalan provinsi, mengingat seringnya hujan yang terjadi dan berdampak pada kondisi ruas jalan yang ada pada daerah-daerah rawan longsor. Penambahan anggaran dan penempatan SDM yang sesuai dengan kompetensinya akan membuat segala permasalahan yang ada dapat tertangani lebih cepat dan baik.

✓ *Prosentase kehandalan bangunan gedung negara*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase kehandalan bangunan gedung negara	55,00 %	58,22%	105,85

Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah 55,00 %. Jumlah bangunan gedung negara dan lingkungan di Provinsi Bali sebanyak 225 unit. Sampai tahun 2016 yang dalam kondisi baik sebanyak 131 unit. Dari tabel diatas dapat dilihat Prosentase kehandalan bangunan gedung negara dan lingkungan adalah sebesar 58,22 % atau sebesar 105,85 % dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2015 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 45,00% dan realisasi sebesar 55,55 % sehingga capaiannya sebesar 123,44 %, Dengan demikian capaian tahun 2016 tidak sebaik jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 75,61% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 58,22% sehingga target yang harus dicapai dalam 2 tahun kedepan sebesar 17,39%.

Untuk mencapai target Tahun 2016 telah dilaksanakan pekerjaan pada kegiatan penataan bangunan dan lingkungan sebagai berikut :

1. Penataan Pura Besakih Kec. Rendang Kab. Karangasem.
2. Penataan Pura Batur Kab. Bangli.
3. Penataan Areal Parkir Taman Pujaan Bangsa Margarana Kab. Tabanan.
4. Rehabilitasi Gedung Jaya Sabha Denpasar.
5. Pembangunan Rumah Sakit Provinsi Bali (lanjutan).
6. Perencanaan Teknis Konstruksi (PTK) Rumah Sakit Provinsi Bali (lanjutan).
7. Manajemen Konstruksi (MK) Rumah Sakit Provinsi Bali (lanjutan).
8. Pembangunan Rumah Sakit Indera (lanjutan).
9. Perencanaan Teknis Konstruksi (PTK) Rumah Sakit Indera (lanjutan).
10. Manajemen Konstruksi (MK) Rumah Sakit Indera (lanjutan).

Pelaksanaan tahun 2016 tidak ada kendala yang prinsip, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2017 adalah

memprioritaskan program kegiatan yang mendukung target renstra tentang kehandalan bangunan gedung negara.

✓ *Prosentase lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	66,00 %	64,20%	97,27

Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah 64,00 %. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) adalah sebesar 64,20 atau sebesar 97,27% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2015 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 64,00% dan realisasi sebesar 62,40% sehingga capaiannya sebesar 97,50%, Dengan demikian capaian tahun 2016 sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 70,00% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 64,20% sehingga target yang harus dicapai dalam 2 tahun kedepan sebesar 5,80%.

Untuk mencapai target tahun 2016 telah dilaksanakan pekerjaan pada kegiatan Pengembangan Perumahan dan Kawasan permukiman pada Bidang Tata Ruang dan Perumahan berupa penyusunan data base perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Bali.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2016 adalah belum terkoordinasinya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang terkait, sehingga sinkronisasi data kebutuhan PSU belum maksimal dan Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2017 adalah perlu dilaksanakan kegiatan Survei kesesuaian norma dan kebutuhan PSU perumahan pada kawasan perkotaan, dengan tujuan mengkomodir kebutuhan PSU perumahan pada Pemerintah Provinsi Bali

Memperhatikan capaian masing-masing indikator dari sasaran Mantapnya Kondisi Infrastruksur yang capaiannya rata-rata telah mencapai 100,00% hal ini dapat dikatakan sebagai keberhasilan terhadap apa yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pengendalian abrasi

Analisis dari pencapaian indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

✓ *Prosentase panjang pantai yang tertangani dari ancaman abrasi (%)*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase panjang pantai yang tertangani dari ancaman abrasi (%)	55,26 %	57,60%	104,23

Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah 55,26 %. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari panjang pantai yang tertangani dari ancaman abrasi adalah sebesar 57,60% atau sebesar 104,23% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2015 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 54,16% dan realisasi sebesar 57,25% sehingga capaiannya sebesar 105,70%, Dengan demikian capaian tahun 2016 lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 57,47% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 57,60% sehingga target sampai dengan tahun ini telah melebihi yaitu sebesar 0,13%.

Dapat disampaikan bahwa kegiatan pengamanan pantai yang telah tertangani sampai dengan tahun 2016 sepanjang 104,651 km yang pendanaannya sebagian besar bersumber dari APBN Kementerian PUPR/ Ditjen Sumber Daya Air (Balai Wilayah Sungai Bali-Penida) sedangkan yang bersumber dari APBD s/d tahun 2016 sepanjang 2,908 km. Untuk mencapai target yang ditetapkan Tahun 2016 Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan pekerjaan pada kegiatan pengamanan pantai yaitu Pengamanan Pantai Bondalem di Kab. Buleleng sepanjang 0,250 Km

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan adalah penggunaan akses/jalan masuk untuk mengangkut material milik desa adat sering dikomersilkan sehingga upaya yang dilakukan pada tahun-tahun berikutnya adalah perlu peningkatan koordinasi secara lebih intensif dengan desa adat setempat disamping itu perlu penambahan *sharing* pendanaan dari APBD Provinsi

Bali terkait penanganan pengamanan pantai, karena pantai di Bali dari segi ritual keagamaan sangat diperlukan masyarakat sebagai salah satu pelestarian nilai-nilai budaya.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis bidang Sumber Daya Air dan capaian target tahun 2016 melalui dana APBD Provinsi Bali telah dilaksanakan pekerjaan pada kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis sumber daya air sebagai berikut :

1. Evaluasi Kinerja Jaringan dan Detail Desain D.I. Yeh Leh dan D.I. Tiyingtali di Kabupaten Tabanan dan Buleleng
2. Evaluasi Kinerja Jaringan dan Detail Desain D.I. Oongan di Kota Denpasar
3. Perencanaan 2 (dua) buah Embung di Kabupaten Karangasem
4. Pengawasan Pengaman Pantai Bondalem di Kab. Buleleng
5. Pengawasan Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi

Sasaran Strategis 3 : Ketersediaan dan kecukupan infrastruktur

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Prosentase penduduk yang berakses air limbah di Provinsi Bali
2. Prosentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali
3. Prosentase cakupan layanan pengelolaan sampah di Provinsi Bali
4. Prosentase elektrifikasi

Analisis dari pencapaian indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

✓ *Prosentase penduduk yang berakses air limbah di Provinsi Bali*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase penduduk yang berakses air limbah di Provinsi Bali	83,00 %	89,29 %	107,58

Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah 83,00 %. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase penduduk yang berakses air limbah di Provinsi Bali adalah sebesar 89,29 % atau sebesar 107,58 % dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2015 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 76,82 % dan realisasi sebesar 64,93

% sehingga capaiannya sebesar 87,76 %. Dengan demikian capaian tahun 2016 jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 90,00% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 89,29% sehingga target yang harus dicapai dalam 3 tahun kedepan sebesar 0,71 %.

Untuk menunjang tercapainya target tahun 2016 tersebut melalui APBD Provinsi Bali dilaksanakan program/ kegiatan yaitu Pemasangan Pipa tersier dan Sambungan Pelanggan Air Limbah perpipaan terpusat di Kab. Badung dan Kota Denpasar

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2016 adalah terbatasnya jumlah *House Inlet* yang tersedia sehingga pemasangan sambungan pelanggan yang dapat dilayani juga terbatas. Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2017 adalah memprioritaskan pemasangan saluran tersier untuk memperbanyak *House Inlet* sehingga sambungan pelanggan lebih banyak bisa dilayani.

✓ *Prosentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali	80,00 %	76,56 %	95,70 %

Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah 80,00 %. Jumlah penduduk provinsi bali sebanyak 4.214.956 orang. Dari jumlah tersebut, berakses air minum sebanyak 3.227.317 orang. Tingkat capaian dari indikator Prosentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali adalah sebesar 76,56 % atau sebesar 95,70 % dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2015 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 75,00% dan realisasi sebesar 79,81% sehingga capaiannya sebesar 106,41%, Dengan demikian capaian tahun 2016 sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 90,00% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 76,56% sehingga target yang harus dicapai dalam 2 tahun kedepan sebesar 13,46%.

Untuk menunjang tercapainya target tahun 2016 melalui APBD Provinsi Bali dilaksanakan program/ kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan SPAM Desa Gunungsari Kec. Penebel Kabupaten Tabanan
2. Pengembangan SPAM Guyangan di Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung
3. Pembangunan SPAM Penet Unit Distribusi

✓ *Prosentase cakupan layanan pengelolaan sampah di Provinsi Bali*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase cakupan layanan pengelolaan sampah di Provinsi Bali	75,00 %	68,75%	91,67

Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah 75,00 %. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase cakupan layanan pengelolaan sampah di Provinsi Bali adalah sebesar 68,75% atau sebesar 91,67% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2015 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 70,00% dan realisasi sebesar 57,34% sehingga capaiannya sebesar 81,91%, Dengan demikian capaian tahun 2016 lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 85,00% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 68,75% sehingga target yang harus dicapai dalam 2 tahun kedepan sebesar 16,25%.

Untuk mencapai target tahun 2016 telah dilaksanakan pekerjaan pada kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan sebagai berikut :

1. Pembelian Material Tanah Penutup TPA Regional Sarbagita
2. Pembelian Material Tanah Penutup TPA Regional Bangli
3. Penataan Jalan Operasional Block Area Hanggar Alat Berat di TPA Regional Sarbagita,
4. Penataan Jalan Operasional Block Area Komposting di TPA Regional Bangli
5. Pemeliharaan TPA Regional Bangli

6. Pemeliharaan TPA Regional Sarbagita
7. Pengadaan Tangki Solar di TPA Regional Sarbagita
8. Pembuatan Pintu Gerbang di TPA Regional Sarbagita
9. Pengadaan Hydrant

Selain itu juga untuk mencapai target yang ditetapkan juga dilaksanakan pekerjaan pada kegiatan Operasional Pengelolaan Prasarana dan Sarana TPA Regional sebagai berikut :

1. Pemasangan instalasi panel ATS (Automatic Transfer Switch) Genset
2. Pengadaan Aerator di IPAL TPA Regional Sarbagita
3. Operasional Pengelolaan Prasarana dan Sarana TPA Regional.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2016 adalah kurangnya sarana dan prasarana pendukung pengolahan persampahan dan tingkat kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dari sumbernya (3R) masih rendah. Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2017 adalah menambah sarana dan prasarana pendukung pengolahan sampah dan koordinasi secara intensif untuk mendorong pemkab/pemkot melaksanakan sosialisasi tentang 3R guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dari sumbernya.

✓ *Prosentase elektrifikasi*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase elektrifikasi	88,60 %	91,56%	103,34

Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah 88,60 %. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase elektrifikasi adalah sebesar 91,56 % atau sebesar 103,34 % dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2015 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 80,62% dan realisasi sebesar 89,19% sehingga capaiannya sebesar 100,66%, Dengan demikian capaian tahun 2016 lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 90,60% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 91,56% sehingga target Renstra telah terlampaui sebesar 0,96%.

Untuk mencapai target tahun 2016 telah dilaksanakan pekerjaan pada kegiatan Mengembangkan Kegiatan Ketenagalistrikan. Peningkatan ratio elektrifikasi selain dari dana APBD Provinsi Bali, juga dari dana DAK dan PT. PLN Persero (Distribusi Bali)

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2016 adalah masih terdapat rumah tangga yang tidak berlistrik yang berada diluar jangkauan jaringan PLN. Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2017 adalah meningkatkan rumah tangga berlistrik di luar jangkauan jaringan PLN secara maksimal melalui berbagai sumber pendanaan.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya energi baru terbarukan

Analisis dari pencapaian indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

✓ *Jumlah kapasitas energi baru terbarukan*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah kapasitas energi baru terbarukan	2,14 MW	3,53 MW	164,95

Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah 2,14 MW. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Jumlah kapasitas energi baru terbarukan adalah sebesar 3,53 MW atau sebesar 164,95% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2015 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 2,12 MW dan realisasi sebesar 2,125 MW sehingga capaiannya sebesar 100,24%, Dengan demikian capaian tahun 2016 jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target sampai dengan tahun 2018 sebesar 10,67MW sedangkan capaian sampai dengan tahun ini sebesar 7,945 MW sehingga target yang harus dicapai dalam 2 tahun kedepan sebesar 2,725 MW atau sebesar 25,54% dari target.

Jumlah pengadaan dan pemasangan *Solar Home System* sampai tahun 2016 di Provinsi Bali sebanyak 3.320 unit. Untuk mencapai target tahun 2016 telah dilaksanakan pekerjaan pada Kegiatan Mengembangkan Kegiatan Ketenagalistrikan sebagai berikut :

1. Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di kabupaten Bangli (DAK), sebanyak 118 unit
2. Pembangunan Instalasi Biogas skala Rumah Tangga di Kab. Bangli (DAK), sebanyak 60 unit

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2016 adalah :

- Belum lengkapnya peraturan perundang-undangan di Daerah yang mengatur pengelolaan bidang ESDM meliputi pertambangan, air tanah, energi dan ketenagalistrikan.
- Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi teknis di Bidang Geologi, Pertambangan dan Ketenagalistrikan.

Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2017 adalah :

- Mempersiapkan Rancangan Perda dan Rancangan Pergub yang mengatur pengelolaan bidang ESDM di Daerah
- Mengusulkan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan Analisis Kebutuhan ke Badan Kepegawaian Daerah

Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan pengendalian sumber daya pertambangan dan geologi

Analisis capaian indikator kinerja dari sasaran ini adalah sebagai berikut :

✓ *Prosentase jumlah usaha pertambangan yang berizin*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase jumlah usaha pertambangan yang berizin	45,00 %	45,00%	100,00

Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah 45,00%. Jumlah usaha pertambangan di Provinsi Bali 158 buah. Jumlah usaha pertambangan yang memiliki izin 71 buah, dan yang belum memiliki izin 87 buah. Dari tabel diatas

dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase jumlah usaha pertambangan yang berizin adalah sebesar 45,00 % atau sebesar 100,00 % dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2015 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 30,00% dan realisasi sebesar 28,12 % sehingga capaiannya sebesar 93,73%, Dengan demikian capaian tahun 2016 lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 75,00% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 45,00% sehingga target yang harus dicapai dalam 2 tahun kedepan sebesar 30,00%.

Untuk mencapai target tersebut telah dilaksanakan kegiatan monitoring dan pengendalian kegiatan pertambangan batuan.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2016 adalah terbatasnya upaya penertiban yang dilakukan dari pemerintah kabupaten dan aparat penegak hukum. Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2017 adalah melakukan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah kabupaten dan aparat penegak hukum.

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah

Analisis dari pencapaian indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

✓ *Prosentase jumlah izin pemanfaatan air tanah yang dilengkapi rekomendasi teknis*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase jumlah izin pemanfaatan air tanah yang dilengkapi rekomendasi teknis	70,00 %	82,00 %	117,14

Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah 70,00%. Jumlah izin pemanfaatan air tanah di Provinsi Bali 1.229 buah. Dari jumlah tersebut telah dilengkapi rekomendasi teknis sebanyak 1.007 buah, sedangkan ijin pemanfaatan air tanah yang belum dilengkapi rekomendasi teknis sebanyak 222 buah. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase jumlah izin pemanfaatan air tanah yang dilengkapi rekomendasi teknis adalah sebesar 82,00 % atau

sebesar 117,14 % dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2015 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 65,00% dan realisasi sebesar 75,41% sehingga capaiannya sebesar 114,63%, Dengan demikian capaian tahun 2016 lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 80,00% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 82,00% sehingga target telah terlampaui sebesar 2,00%. Untuk mencapai target melalui Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral telah melakukan pembinaan ke 9 (sembilan) kabupaten/kota terkait pemanfaatan air tanah.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2016 adalah keterbatasan personil teknis dalam bidang geologi dan pertambangan serta sarana yang kurang memadai untuk peninjauan/monitoring lapangan.

Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2017 adalah penambahan personil teknis dalam bidang geologi dan pertambangan serta pengadaan sarana transportasi yang lebih memadai untuk operasional kegiatan

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu :

1. Prosentase responden yang puas terhadap kualitas hasil layanan laboratorium pengujian dan alat berat
2. Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan air limbah
3. Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan air minum
4. Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan pengelolaan persampahan

Analisis capaian indikator kinerja dari sasaran ini adalah sebagai berikut :

✓ *Prosentase responden yang puas terhadap kualitas hasil layanan laboratorium pengujian dan alat berat*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase responden yang puas terhadap kualitas hasil layanan laboratorium pengujian dan alat berat	100,00 %	100,00%	100,00

Target yang ditetapkan pada tahun 2016 pada indikator Prosentase responden yang puas terhadap kualitas hasil layanan laboratorium pengujian dan alat berat adalah 100,00%. Jumlah responden yang menggunakan layanan laboratorium pengujian dan alat berat sebanyak 71 responden. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase responden yang puas terhadap kualitas hasil layanan laboratorium pengujian dan alat berat adalah sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2015 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 100,00% dan realisasi sebesar 100,00% sehingga capaiannya sebesar 100,00%, Dengan demikian capaian tahun 2016 sama baiknya dengan capain tahun lalu.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target tahun 2016 yaitu :

- Pada Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Tanah dan Bahan Bangunan dilaksanakan pekerjaan Pengadaan alat-alat laboratorium
- Pada kegiatan Pelaksanaan Pelayanan alat berat dilaksanakan pekerjaan Pengadaan truck selft loader

Permasalahan yang dihadapi yaitu Laboratorium pada UPT. Balai Peralatan dan Pengujian belum ter-Akreditasi sehingga tidak memiliki daya saing dan Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang laboratorium kualitas air maupun dibidang tanah dan bahan bangunan.

Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2017 adalah Mengikuti Uji Profesi secara berkala yang diselenggarakan oleh Puslitbang Kementerian PU-PR, Menyiapkan langkah-langkah administrasi menuju proses Akreditasi (KAN) dan Penyiapan Sumber Daya Manusia dibidang Laboratorium ke PU-an bekerjasama dengan Kementrian PUPR.

✓ *Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan air limbah*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan air limbah	100,00 %	100%	100

Target yang ditetapkan tahun 2016 untuk indikator Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan air limbah adalah 100,00% hal tersebut terkait dengan lancarnya aliran air limbah yang mengalir dari hilir ke hulu, keluhan masyarakat sebanyak kurang lebih 1000 keluhan namun telah berhasil ditangani dan mereka puas terhadap pelayanan yang diberikan. Apabila dibandingkan dengan Tahun

2015 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 100,00% dan realisasi sebesar 100,00% sehingga capaiannya sebesar 100,00%, Dengan demikian capaian tahun 2016 sama baiknya dibandingkan dengan tahun lalu. Untuk tingkat kepuasan setiap tahunnya menggunakan target yang sama yaitu 100,00%, namun yg berbeda adalah jumlah responden yang digunakan.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan perlu semakin ditingkatkan karena sebagian besar permasalahan karena tersumbatnya jaringan perpipaan akibat sampah yang masuk ke dalam sistem sehingga diperlukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.
- b. Pemasangan grease trap perlu dibuatkan aturan dan dasar hukumnya mengingat lemak yang mengalir ke jaringan bisa mengeras dan menyumbat jaringan.
- c. IPLT yang saat ini dalam masa uji coba perlu penyempurnaan sistem sehingga memudahkan dalam operasional dan pemeliharaan.
- d. Kolam aerasi pasca berfungsinya IPLT perlu mendapat penanganan serius untuk mengembalikan fungsi dan kondisinya, demikian juga dengan kolam sedimentasi perlu pengurusan sehingga berfungsi dengan baik
- e. UPT PAL memerlukan fleksibilitas dalam menerapkan anggaran terutama di awal tahun dan akhir tahun karena keluhan masyarakat tidak bisa ditunda

Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Mengadakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun media audio visual.
- b. MOU dengan pelanggan dibuatkan klausul khusus pemasangan grease trap dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab pelanggan.
- c. Pengurusan kolam aerasi dan kolam sedimentasi dilakukan secara periodik sehingga kondisi mikroorganisme di kedua kolam tersebut sehat.
- d. Kondisi aerator yang berjumlah 21 tersebut harus terpantau dengan baik dan dalam kondisi yang fit. Perbaikan dan pemeliharaan aerator sangat diperlukan agar kondisi aerator mantap.
- e. Berkoordinasi dengan Satker PPLP Bali agar menyempurnakan sistem IPLT yang sudah terbangun.
- f. Menambah tenaga IPLT dan memberikan pelatihan sehingga tenaga di IPLT memiliki ketrampilan yang baik untuk mengoperasikan IPLT.

g. UPT PAL yang akan menerapkan PPK BLUD merupakan solusi untuk mengatasi masalah anggaran karena memiliki fleksibilitas menerapkan anggaran.

✓ *Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan air minum*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan air minum	100,00 %	88,40 %	88,40

Target yang ditetapkan untuk indikator Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan air minum adalah 100,00%. Jumlah responden yang menggunakan pelayanan air minum sebanyak 3 responden yaitu PDAM Badung, Denpasar dan Gianyar dan yang menyatakan puas sebanyak 3 responden, untuk tingkat capaian Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan air minum adalah sebesar 88,40 %. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2015 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 100% dan realisasi sebesar 85,20% sehingga capaiannya sebesar 85,20 %, Dengan demikian capaian tahun 2016 lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu.

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target tahun 2016 yaitu :

- Penambahan konstruksi Jaringan Air Minum :
 - Water Meter SPAM Telagawaja
 - Water Meter SPAM Guyangan
 - Water Meter Display Remote pada Tapping Ketewel
 - Water Meter Display Remote pada Tapping Waribang
 - Bangunan Klorinasi Reservoir IV SPAM Guyangan
- Penambahan alat-alat bengkel :
 - Butt Fussion HDPE
- Penambahan mesin Generator :
 - Generator set 1 phase
- Penambahan alat-alat komunikasi :
 - Pemancar dan perlengkapannya
- Penambahan alat-alat laboratorium :
 - Komparator Test kit Klorine
 - Klorine Meter

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pendistribusian air dari Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) Petanu dari kapasitas maksimal 300 liter/detik saat ini baru mencapai 160 Liter/detik
- b. Pasokan air SPAM Penet dari Tukad Penet sering terganggu akibat sering bermasalahnya Bendung Karet pada Long Storage dan sedimentasi yang cukup tebal pada mulut intake Instalasi Pengolahan Air (IPA) Penet.
- c. Pengaliran air SPAM Telagawaja sering terganggu akibat sering bocornya Pipa Induk (Transmisi)
- d. Masih banyaknya Sambungan Rumah (SR) Liar dan Keran Umum (KU) yang menikmati air SPAM Telagawaja secara gratis mengakibatkan kecemburuan sosial bagi masyarakat yang sudah menjadi pelanggan PDAM. Disamping itu akibat masih gratis, menimbulkan keengganan menjadi pelanggan PDAM dan pemakaian air yang kurang bijaksana.
- e. Pendistribusian air SPAM Guyangan yang tidak merata (terutama daerah hilir) akibat banyaknya sambungan liar pada daerah hulu yang mengakibatkan kecemburuan sosial pada masyarakat. Disamping itu kurangnya kesadaran masyarakat menjaga aset yang mengakibatkan terganggunya pendistribusian air SPAM Guyangan.

Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Membuat Kajian Evaluasi Sistem Jaringan Distribusi Utama SPAM Petanu dalam upaya mengoptimalkan Sistem Jaringan Distribusi Utama sehingga dapat mengalir dan mensupply air secara maksimal sesuai dengan yang direncanakan.
- b. Melakukan uji oba dan flushing pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) Penet agar mendapatkan kuantitas dan kualitas air yang diinginkan dan dipersyaratkan.
- c. Berkordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida untuk melakukan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala (penggalian sedimentasi/normalisasi) terhadap Bendung Karet pada Long Storage Tukad Penet untuk meminimalkan gangguan.
- d. Berkordinasi dengan BWS Bali Penida untuk mengkaji sistem perpipaan pada Jaringan Transmisi dan melakukan pemeliharaan/perbaikan sesegera mungkin jika terjadi kebocoran.

✓ *Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan pengelolaan persampahan*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan pengelolaan persampahan	100,00 %	100,00 %	100,00

Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah 100,00%. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan pengelolaan persampahan adalah sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2015 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 100,00% dan realisasi sebesar 100,00% sehingga capaiannya sebesar 100,00%, Dengan demikian capaian tahun 2016 sama baiknya dibandingkan dengan tahun lalu. Untuk mencapai target tahun 2016 telah dilaksanakan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2016 adalah kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam pengelolaan sampah. Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2017 adalah peningkatan Sumber daya Manusia yang berkompeten dalam pengelolaan sampah.

3.2. REALISASI KEUANGAN

Realisasi anggaran dan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

- Pagu tahun 2016 adalah sebesar Rp. 588.768.690.127,- (Lima ratus delapan puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - Belanja pegawai Rp. 8.453.899.280,00
 - Belanja barang /jasa Rp. 61.103.293.040,00
 - Belanja Modal Rp. 519.211.497.807,00
- Realisasi anggaran pada per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 577.911.991.469,58 (lima ratus tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus enam puluh

sembilan koma lima puluh delapan rupiah) atau sebesar 98,16% dari pagu anggaran, dengan perincian sebagai berikut :

- Belanja pegawai Rp. 8.226.783.160,00
- Belanja barang /jasa Rp. 57.909.904.136,00
- Belanja Modal Rp. 511.775.304.173,58

Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2016

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Relisasi	
			Anggaran (Rp.)	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.678.672.010,00	5.969.700.131,00	89,38
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.958.222.700,00	7.480.507.989,00	93,99
3	Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi	134.916.000,00	126.705.670,00	93,91
4	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	21.723.630.000,00	18.630.247.543,58	85,76
5	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	3.448.514.620,00	3.383.608.241,00	98,11
6	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	35.472.541.580,00	34.116.519.041,00	96,17
7	Program Pengendalian Banjir	5.114.033.230,00	3.521.996.200,00	68,86
8	Pengembangan Perumahan dan Permukiman	174.659.000,00	170.032.100,00	97,35
9	Pendayagunaan Perencanaan Pengelolaan dan Pelaksanaan Pengawasan ke PU-an	73.400.000,00	69.851.100,00	95,16
10	Program kehumasan Ke-PU-an	150.000.000,00	149.900.000,00	99,93
11	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2.007.286.120,00	1.957.398.590,00	97,51
12	Pengembangan Jasa Konstruksi	294.235.000,00	256.047.395,00	87,02
13	Program Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta Karya	1.781.970.340,00	1.758.493.040,00	98,68
14	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	4.395.930.747,00	4.105.958.198,00	93,40
15	Program Penataan Bangunan	17.775.541.000,00	17.742.804.100,00	85,36
16	Program Perencanaan Tata Ruang	265.969.380,00	257.903.280,00	96,96

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Relisasi	
			Anggaran (Rp.)	%
17	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	95.881.153.625,00	94.757.744.819,00	98,82
18	Program Pengembangan Jalan dan Jembatan	6.314.714.215,00	6.256.674.315,00	99,08
19	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	116.358.052.300,00	115.903.077.183,00	99,60
20	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Umum	125.723.520,00	111.687.475,00	88,83
21	Program Peningkatan Efektivitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam	248.825.000,00	226.957.499,00	91,21
22	Program Pengelolaan dan Pengembangan Bidang Pertambangan Umum	73.214.000,00	65.566.800,00	89,55
23	Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ketenagalistrikan, Usaha Energi Terbarukan dan Konservasi Energi	3.008.320.000,00	2.790.077.900,00	92,74
24	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan	259.183.063.740,00	257.985.122.560,00	99,53
Total		588.768.690.127,00	577.911.991.469,58	98,16

Adapun penjelasan dari tabel diatas adalah sebagai berikut :

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali di tahun 2016 melaksanakan sebanyak 24 program yang terdiri dari 109 kegiatan. Pagu anggaran pada tahun ini adalah sebesar Rp. 588.768.690.127,- dimana realisasi anggarannya sebesar Rp. 577.911.991.469,58 atau sebesar 98,16%

Anggaran dan Realisasi pada masing-masing bidang
Dinas Pekerjaan Umum Prov. Bali 2016

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
I.	Sekretariat	6.555.886.390,00	6.179.412.561,00	94,26
II.	Bidang Pengkajian dan jasa Konstruksi	455.801.000,00	406.134.165,00	89,10
III.	Bidang Sumber Daya Air	30.286.177.850,00	25.535.854.984,58	84,32
IV.	Bidang Bina Marga	218.553.920.140,00	216.917.496.317,00	99,25
V.	Bidang Cipta Karya	294.988.806.280,00	293.715.121.900,00	99,57

VI.	Bidang Tata Ruang	566.730.380,00	545.342.680,00	96,23
VII.	Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	3.456.082.520,00	3.194.289.674,00	92,43
VIII.	UPT. Balai Peralatan dan Pengujian	2.531.611.220,00	2.453.326.586,00	96,91
IX.	UPT. Pengelolaan Air Minum	16.080.950.940,00	14.663.867.180,00	91,19
X.	UPT. Pengelolaan Air Limbah	9.716.174.940,00	9.104.841.769,00	93,71
XI.	UPT. Pengelolaan Sampah	5.576.548.467,00	5.196.303.653,00	93,18
Jumlah total		588.768.690.127,00	577.911.991.469,58	98,16

Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2016

Dinas Pekerjaan Umum Prov. Bali

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A	Pendapatan			
	1. Pendapatan Asli Daerah	14.777.470.400,00	19.883.370.554,00	134,55
	Total Pendapatan	14.777.470.400,00	19.883.370.554,00	134,55
B	Belanja			
	1. Belanja Tidak Langsung	41.721.153.985,00	36.700.637.010,00	87,96
	2. Belanja Langsung :	588.768.690.127,00	577.911.991.469,58	98,16
	a. Belanja Pegawai	8.453.899.280,00	8.226.783.160,00	97,31
	b. Belanja Barang dan Jasa	61.103.293.040,00	57.909.904.136,00	94,77
	c. Belanja Modal	519.211.497.807,00	511.775.304.173,58	98,57
	Total Belanja	630.489.844.112,00	614.612.628.479,58	97,48
	Surplus/Defisit	615.712.373.712,00	594.729.257.925,58	96,59

Adapun penjelasan dari tabel diatas adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Pendapatan

- Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 14.777.470.400,00 yang merupakan pendapatan yang berasal dari hasil retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jika dibandingkan dengan jumlah pendapatan Asli Daerah tahun 2015 sebesar Rp. 10.931.555.500,00 pendapatan tahun 2016 lebih besar dari pendapatan tahun sebelumnya.

2. Realisasi Belanja

▪ Belanja Tidak Langsung

Pagu anggaran untuk Belanja Tidak Langsung Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali adalah sebesar Rp. 41.721.153.985,00 dimana realisasi per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 36.700.637.010,00 atau sebesar 87,96% dari pagu anggaran. Apabila dibandingkan dengan tahun 2015 yang realisasinya sebesar Rp. 36.634.601.555,00 atau sebesar 91,56%.

▪ Belanja Langsung

Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal. Pada tahun 2016 pagu anggaran adalah sebesar Rp. 588.768.690.127,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp.577.911.991.469,58 atau sebesar 98,16% dari pagu anggaran. Apabila dibandingkan dengan tahun 2015 realisasi tahun 2016 lebih tinggi dari realisasi tahun 2015 dimana realisasinya sebesar Rp. 470.620.574.421,00 atau sebesar 87,65%.

Sisa anggaran yang tidak terserap dari rencana dikarenakan oadanya efisiensi berupa dana sisa lelang dari paket pekerjaan yang dikontrakkan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PU Provinsi Bali tahun 2016 adalah bentuk pertanggungjawaban Kepala SKPD terhadap Perjanjian Kinerja 2016 yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran dan sekaligus merupakan media akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan pada lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali.

Capaian indikator kinerja terhadap 7 (tujuh) sasaran strategis yang telah ditetapkan, menjadi tolok ukur keberhasilan dari apa yang ditetapkan di awal tahun anggaran. Capaian dari masing-masing indikator sebagian besar diatas 97%, walaupun masih terdapat beberapa capaian yang lebih kecil dari 95%, namun semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. Capaian ini akan dijadikan pedoman pada apa yang akan direncanakan dan ditetapkan pada tahun anggaran berikutnya, untuk mencapai target Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali tahun 2014-2018. Realisasi Anggaran yang bersumber dari dana APBD Provinsi Bali, pagu sebesar Rp. 588.768.690.127,00 dan terealisasi sebesar Rp. 577.911.991.469,58 atau sebesar 98,16% sehingga terjadi efisiensi sebesar 1,84 %.

LKjIP tahun 2016 selain menyampaikan capaian pada tahun berjalan, juga membandingkan capaian indikator kinerja dengan tahun sebelumnya dan termasuk juga perbandingan serapan anggarannya. Untuk meningkatkan pencapaian kinerja kegiatan, maka hal-hal yang perlu diupayakan untuk tahun mendatang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Masih perlu ditingkatkan koordinasi dan komunikasi tentang perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan dengan pihak terkait, baik dengan pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Pusat

maupun dengan apraiser agar pencapaian sasaran bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

2. Meningkatkan intensitas forum diskusi antar bidang untuk lebih memahami tugas pokok dan fungsi, meningkatkan sinergitas program kegiatan antar sector, peningkatan kualitas SDM, serta penyamaan mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan maupun evaluasi pelaksanaan fisik serta realisasi keuangan.
3. Penyusunan OE (Owner Estimate) yang lebih cermat, memperhatikan kondisi lingkungan dimana kegiatan akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur-unsur efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
4. Dalam merumuskan rencana anggaran perlu memperhatikan program/kegiatan prioritas, terutama yang telah tertuang dalam Indikator Kinerja Utama sehingga menjadi tolak ukur teknis pencapaian keberhasilan kegiatan pada tahun mendatang.

LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI

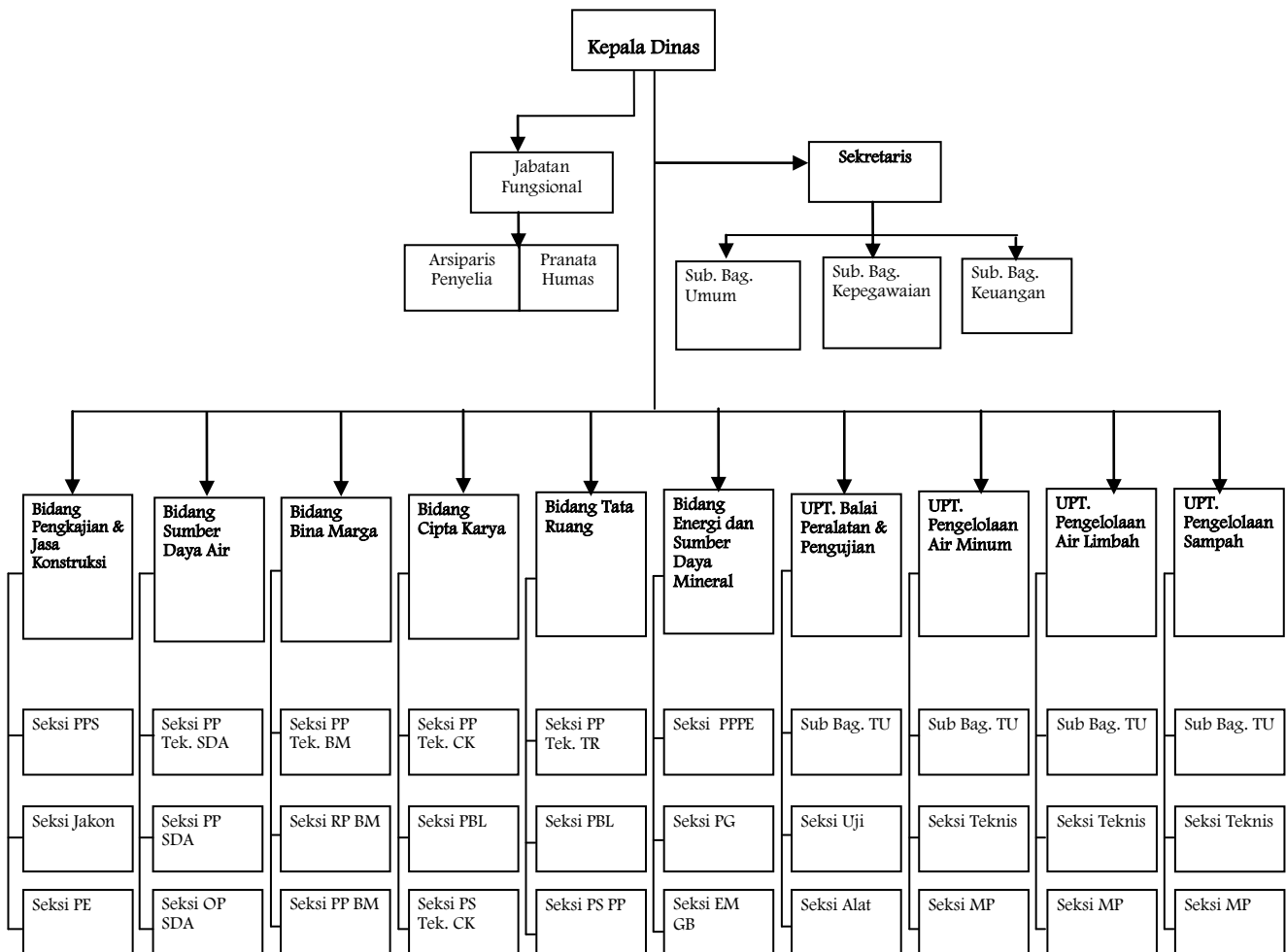


Diagram 1.1.

Struktur Organisasi Tahun 2016

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas PU Provinsi Bali